



RENCANA KERJA

TAHUN 2026



**KECAMATAN MOJOWARNO
KABUPATEN JOMBANG**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja Kecamatan Mojowarno tahun 2026 merupakan acuan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Mojowarno yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 yang memuat kondisi pelayanan, gambaran tujuan, sasaran serta rencana pembangunan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Mekanisme dan tahapan penyusunan Renja Kecamatan Mojowarno sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen rencana kerja Kecamatan Mojowarno tahun 2026 masih banyak keterbatasan, sehingga dibutuhkan masukan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dokumen ini.

Harapan kami semoga Rencana Kerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2026 ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif, dan akuntabel.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mojowarno, 11 Agustus 2025

Plt. CAMAT MOJOWARNO



M. RONNY AFRIANDIE, S.STP., M.Si

Pembina

NIP. 198105231999121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...	41
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	46
2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	55
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	58
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	58
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	60
3.3 Program dan Kegiatan.....	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	72
BAB V PENUTUP	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan pencapaian tingkat layanan kinerja pembangunan yang maksimal serta pencapaian visi dan misi daerah untuk pembangunan suatu wilayah, maka perencanaan menduduki peran yang sangat vital dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Jombang mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran melalui program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- Renja merupakan acuan untuk memasukkan program, kegiatan dan subkegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun berkenaan;
- Merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pengukuran capaian kinerja Kecamatan Mojowarno.

Mengingat arti penting dari Renja, maka penyusunannya diupayakan dapat mengakomodasi proses pendekatan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Daerahnysusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta dalam rangka sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, maka hal-hal yang ditekankan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2017 juga menjadi bahan pertimbangan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut secara substansi menekankan pentingnya kesinambungan dan keterpaduan antara dokumen perencanaan jangka menengah sebelumnya,

dokumen saat ini, dan arah pembangunan masa depan. Oleh karena itu, penyusunan Renja Kecamatan Mojowarno Tahun 2026 dilaksanakan dengan mempertimbangkan capaian dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025–2029 dan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2025–2029.

Dokumen Renja ini tidak hanya memuat program dan kegiatan tahunan yang mendukung target jangka menengah, tetapi juga disusun sebagai bagian dari kesinambungan siklus perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil (*outcome-based planning*), serta menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan tahun-tahun berikutnya secara terukur, terpadu, dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang : Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

- Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri No. 90/2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 10/E ;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
 19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jombang nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45/D, Tambahan Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 45/D);
 20. Peraturan Bupati Jombang Nomor tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Jombang tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Bupati Jombang Nomor Tahun 202 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

22. Surat Edaran Bupati Jombang tanggal 20 Desember Tahun 2024 Nomor : 000.7/783/ 415.01/ 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Tujuan penyusunan adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam upaya mencapai tujuan dengan cara menyusun program, kegiatan dan subkegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun;
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renja OPD Kecamatan Mojowarno Tahun 2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025-2029 dan Rancangan Renstra Kecamatan Mojowarno Tahun 2025-2029, serta berdasarkan hasil evaluasi Renja tahun 2024.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kepala Daerah Kabupaten Jombang sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Mojowarno pada tahun 2024 melaksanakan 1 Urusan , yang dijabarkan dalam 6 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 12 Kegiatan dan 25 subkegiatan serta telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program, kegiatan dan subkegiatan. Adapun

Tabel 2.1
Program dan Kegiatan Kecamatan Mojowarno Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapann
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset

Hasil evaluasi terhadap program/ kegiatan/ Sub kegiatan pada Renja Kecamatan Mojowarno tahun 2024 secara umum dapat dikatakan telah memenuhi target, dapat dijelaskan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Realisasi program / kegiatan / subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Pada pelaksanaan Renja 2024 terdapat program yang tidak memenuhi target, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- Target kinerja tercapai 92,35% dengan tercapainya nilai PATEN tahun 2023 sebesar 85,61 dari nilai yang ditargetkan sebesar 92,70
- Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.762.500 dari pagu anggaran Rp. 6.762.500

b. Realisasi program / kegiatan /subkegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Pada pelaksanaan Renja 2024 terdapat Program / kegiatan/ subkegiatan yang memenuhi target Renja 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- .1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Target kinerja tercapai 100% dengan tersusunnya semua dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD sesuai aturan.
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 97,40% dengan realisasi sebesar Rp. 3.753.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.853.000 dikarenakan adanya selisih harga riil dengan harga yang direncanakan
- .1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Target kinerja tercapai 100% dengan tersusunnya 2 dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu dokumen Renja tahun 2025 dan Dokumen Renja perubahan tahun 2024
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 96,83% dengan realisasi sebesar Rp. 3.053.000 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.153.000 dikarenakan adanya selisih harga riil dengan harga yang direncanakan
- .1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Target kinerja tercapai 100% dengan tersusunnya 5 laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja kecamatan mojowarno yaitu 4 dokumen laporan capaian kinerja tribulan dan 1 dokumen LKJiP tahun 2024 Kecamatan Mojowarno
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 100% dengan realisasi sebesar Rp. 700.000 dari pagu anggaran Rp. 700.000
- .2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Target kinerja tercapai 100% dengan terkoordinasikannya pelaksanaan administrasi keuangan Kecamatan Mojowarno sehingga prosentase pencairan gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu tercapai 100% dan prosentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan juga tercapai 100%
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 90,63 % dengan realisasi sebesar Rp. 1.996.179.033 dari pagu anggaran Rp. 2.202.555.421, hal ini dikarenakan adanya mutasi pegawai dan pensiun pegawai
- .2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Target kinerja tercapai 100% dengan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan ASN untuk 16 orang/bulan
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 90,29% dengan realisasi sebesar Rp. 1.919.801.033 dari pagu anggaran Rp. 2.126.177.421, hal ini dikarenakan adanya mutasi pegawai dan pensiun pegawai
- .2.2 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Target kinerja tercapai 100% dengan terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yaitu tersusunnya dokumen CaLK Kecamatan Mojowarno tahun 2024
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 100% dengan realisasi sebesar Rp. 700.000 dari pagu anggaran Rp. 700.000
- .2.3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD

- Target kinerja tercapai 100% dengan tersusunnya 12 dokumen penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD yang sesuai aturan untuk tahun anggaran 2024
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 100% dengan realisasi sebesar Rp. 75.678.000 dari pagu anggaran Rp. 75.678.000
- .3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Target kinerja telah tercapai dengan terkoordinasikannya pelaksanaan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran sehingga presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran dapat tercapai 100%
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 95,13% dengan realisasi sebesar Rp. 71.501.749 dari pagu anggaran Rp. 75.161.550 dikarenakan adanya selisih harga riil dengan harga yang direncanakan
- .3.1 Penyediaan komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor
- Target kinerja tercapai 100% yaitu dengan tersedianya 1 paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 99,89% dengan realisasi sebesar Rp. 3.199.000 dari pagu anggaran Rp.3.202.600 dikarenakan adanya selisih harga riil dengan harga yang direncanakan
- .3.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Target kinerja tercapai 100% yaitu dengan tersedianya 2 paket peralatan dan perlengkapan kantor
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 99,99% dengan realisasi sebesar Rp. 12.073.000 dari pagu anggaran Rp. 12.073.950 dikarenakan adanya selisih harga riil dengan harga yang direncanakan
- .3.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Target kinerja tercapai 100% yaitu dengan tersedianya 2 paket barang cetak dan penggandaan
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 100% dengan realisasi sebesar Rp.3.420.000 dari pagu anggaran Rp. 3.420.000
- .3.4 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Target kinerja tercapai 100% yaitu dengan tersedianya 1 dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 100% dengan realisasi sebesar Rp. 2.352.000 dari pagu anggaran Rp. 2.352.000
- .3.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Target kinerja tercapai 100% yaitu dengan tersusunnya 17 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 99,54% dengan realisasi sebesar Rp. 18.497.749 dari pagu anggaran Rp. 18.584.000 950 dikarenakan adanya selisih harga riil dengan harga yang direncanakan
- .4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Target kinerja telah tercapai 100% dengan telah terealisasinya seluruh pengadaan sarana dan prasarana tahun anggaran 2024
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 98,69 % dengan realisasi sebesar Rp. 131.905.250 dari pagu anggaran Rp. 133.651.000 dikarenakan adanya selisih harga riil dengan harga yang direncanakan
- .4.1 Subkegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung lantor / bangunan lainnya
- Target kinerja tercapai 100% yaitu dengan Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung lantor / bangunan lainnya sebanyak 30 unit terdiri dari 1 unit penghancur kertas, 1 unit LCD, 3 unit laptop, 1 unit TV, 2 filling cabinet, 3 unit kursi staf, 1 unit scanner, 1 bendera merahputih, 4 umbul-umbul pendopo, 4 umbul-umbul merahputih logo pemkab, 1 unit AC, 1 unit kursi roda, 3 unit meja staf, 2 router, 1 switch hub dan 1 pompa air
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 98,69 % dengan realisasi sebesar Rp. 131.905.250 dari pagu anggaran Rp. 133.651.000 dikarenakan adanya selisih harga riil dengan harga yang direncanakan
- .5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Target kinerja telah tercapai 100% dengan terkoordinasinya pelaksanaan pemenuhan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sehingga indikator kinerja Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah dapat tercapai 100% dari target 100%
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 92,61 % dengan realisasi sebesar Rp. 95.188.285 dari pagu anggaran Rp. 102.780.000 dikarenakan adanya selisih harga riil dengan harga yang direncanakan
- .1.1 Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Target kinerja tercapai 100% yaitu dengan tersusunnya 24 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 79,52% dengan realisasi sebesar Rp. 29.055.305 dari pagu anggaran Rp. 36.540.000 dikarenakan adanya perbedaan antara tagihan listrik dan telepon yang harus dibayar dengan tagihan listrik dan telepon yang direncanakan
- .1.2 Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Target kinerja tercapai 100% yaitu dengan tersusunnya 24 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 99,84 % dengan realisasi sebesar Rp. 66.132.980 dari pagu anggaran Rp. 66.240.000 dikarenakan adanya perbedaan antara tagihan BPJS Non PNS yang harus dibayar dengan tagihan BPJS Non PNS yang direncanakan
- .2 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
- Target kinerja telah tercapai 100% dengan Terkoordinasinya pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah sehingga indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik dapat tercapai 100% dari target 100%

- Capaian realisasi anggaran sebesar 99,30 % dengan realisasi sebesar Rp. 73.645.624 dari pagu anggaran Rp. 74.162.950 dikarenakan adanya selisih harga riil dengan harga yang direncanakan
 - .1.1 Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan
 - Target kinerja tercapai 100% yaitu dengan telah terlaksananya pemeliharaan, dan pembayaran pajak dan perizinan 7 unit kendaraan dinas atau lapangan
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 98,74% dengan realisasi sebesar Rp. 37.914.524 dari pagu anggaran Rp. 38.400.000 dikarenakan adanya selisih tagihan pajak kendaraan dengan tagihan pajak yang direncanakan
 - .1.2 Subkegiatan Pemeliharaan rutin/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
 - Target kinerja tercapai 100% yaitu dengan terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana meliputi 6 unit AC dan 6 unit computer.
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 99,68% dengan realisasi sebesar Rp. 9.629.000 dari pagu anggaran Rp. 9.660.000
 - .1.3 Subkegiatan Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Target kinerja tercapai 100% yaitu dengan terlaksananya 3 unit Gedung kantor dan bangunan lainnya.
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 99,99% dengan realisasi sebesar Rp. 26.102.100 dari pagu anggaran Rp. 9.660.000 dikarenakan adanya selisih harga riil dengan harga yang direncanakan
2. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 2.1 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Target kinerja telah tercapai 100% dengan telah terlaksananya seluruh pelayanan PATEN sesuai standar
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan realisasi sebesar Rp. 6.762.500 dari pagu anggaran Rp. 6.762.500
- 2.1.1. Subkegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Target kinerja tercapai 100% dengan tersusunnya 12 laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan realisasi sebesar Rp. 6.762.500 dari pagu anggaran Rp. 6.762.500
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- Target kinerja tercapai 100% dengan terlaksananya semua kegiatan PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan, serta telah ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi forkopimcam
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 96,67 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.821.000 dari pagu anggaran Rp. 72.221.000, dikarenakan adanya kekosongan jabatan Camat selaku ketua Forkopimcam
- 3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Target kinerja tercapai dengan tersusunnya 5 laporan terdiri dari : 1 laporan kegiatan PHBN/PHBA peringatan HUT RI dan 4 laporan monev social budaya tribulanan yang dilaksanakan
- Target kinerja tercapai dengan tersusunnya 4 dokumen rekomendasi hasil koordinasi forkopimcam, yaitu : 1)Pelaksanaan apel kerja dalam rangka pleno terbuka rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 untuk mengawal jalannya Pemilu agar berjalan lancar, aman dan tertib (2)Penyelenggaraan pengamanan perayaan undhuh-undhuh di GKJW Mojowarno (3)Pengamanan penyelenggaraan konser musik El-Samba di desa sidokerto (4) Penentuan lokasi penyimpanan logistik pilgub dan pilkada di tingkat kecamatan
- Capaian realisasi anggaran sebesar 96,67 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 69.821.000 dari pagu anggaran Rp. 72.221.000, dikarenakan adanya kekosongan jabatan Camat selaku ketua Forkopimcam

3.1.1 Subkegiatan Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa

- Target kinerja tercapai 100 % dengan terselenggaranya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang dihadiri oleh 45 orang, dari unsur pemerintah desa, organisasi maupun Lembaga kemasyarakatan
- Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.521.000.000 dari pagu anggaran Rp. 27.521.000

3.1.2 Subkegiatan Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

- Target kinerja tercapai 100 % dengan tersusunnya 4 dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan.
- Capaian realisasi anggaran sebesar 94,63 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.300.000 dari pagu anggaran Rp. 44.700.000, dikarenakan adanya kekosongan jabatan Camat selaku ketua Forkopimcam, sehingga penyerapan rekening honor forkopimcam tidak bisa maksimal.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Target kinerja tercapai 100% dengan Telah ditindaklanjutinya oleh instansi terkait atas seluruh laporan kasus pelanggaran perda dan gangguan trantibum di tahun 2024 yaitu : (1)laporan adanya penemuan mayat bayi di desa rejoslamet (2)laporan adanya serangan ulat bulu di SDN Menganto (3) laporan penyelenggaraan konser musik di desa sidokerto yang rawan kerusakan (4) Adanya laporan terkait keberadaan gereja orthodox di desa mojawangi (5)permohonan bantuan personil dalam rangka penertiban bangunan ruko di lahan milik korem 082 mojokerto yang berada di wilayah desa selorejo
- Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.900.000 dari pagu anggaran Rp. 8.900.000

4.1 Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Target kinerja tercapai 100 % dengan telah terkoordinasikannya seluruh laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan instansi terkait
- Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.900.000 dari pagu anggaran Rp. 8.900.000

4.1.1 Subkegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia

- Target kinerja tercapai 100 % dengan Telah tersusunnya 12 laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia
- Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.900.000 dari pagu anggaran Rp. 8.900.000

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Target kinerja tercapai 100% dengan presentase desa yang perencanaan pembangunan dan Lembaga pemberdayaan Masyarakat yang aktif telah tercapai 100 %
- Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan telah terealisasinya seluruh pagu anggaran sebesar Rp. 52.868.000

5.1 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Target kinerja tercapai 100 % dengan telah terlaksananya pembinaan terhadap 38 Lembaga/badan usaha pemberdayaan masyarakat desa, serta tersusunnya 19 RKPDes
- Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan telah terealisasinya seluruh pagu anggaran sebesar Rp. 52.868.000

5.1.1 Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan

- Target kinerja tercapai 100% dengan telah tersusunnya 4 laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan telah terealisasinya seluruh pagu anggaran sebesar Rp. 52.868.000

5.1.2 Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Target kinerja tercapai 100% dengan telah berpartisipasi 114 lembaga kemasyarakatan dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa
- Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan telah terealisasinya seluruh pagu anggaran sebesar Rp. 52.868.000

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Target kinerja tercapai 100% dengan telah dilaporkannya pertanggungjawaban realisasi APBDes oleh 19 desa tepat waktu
- Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.975.000 dari pagu anggaran Rp. 16.975.000

6.1 Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Hingga akhir periode pelaporan, seluruh desa telah menyampaikan laporan realisasi APBDes sesuai ketentuan dan waktu yang ditetapkan. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.975.000 dari pagu anggaran Rp. 16.975.000

6.1.1 Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

- Target kinerja 100 % dengan Telah tersusunnya 38 dokumen yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa

- Capaian realisasi anggaran sebesar 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.975.000 dari pagu anggaran Rp. 16.975.000

c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada pelaksanaan Renja 2024 terdapat Program / kegiatan / subkegiatan yang melebihi target Renja 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota :
 - Target kinerja tercapai 100,05% dengan presentase rata-rata capaian kinerja aparatur tercapai 100,05 % .
 - Capaian realisasi anggaran sebesar 91,55 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.382.972.941 dari pagu anggaran Rp. 2.602.964.921

d. Faktor- faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan.

Secara umum target kinerja pada dokumen Renja tahun 2024 kecuali pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Factor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada Renja 2024 adalah :

1. Kapasitas SDM Pelayanan Belum Optimal
Masih terdapat kekurangan dalam hal kompetensi teknis dan soft skills ASN yang menangani layanan PATEN, khususnya pada aspek komunikasi pelayanan dan penguasaan sistem digital
2. Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi Layanan
Belum terdapat inovasi baru dalam model pelayanan, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat proses layanan kepada masyarakat
3. Kendala Teknis Sarana dan Prasarana
Fasilitas layanan publik seperti ruang tunggu, sistem antrean,CCTV dan kelengkapan pendukung lainnya membutuhkan pemeliharaan sehingga tidak tersedia secara optimal.
4. Keterlambatan Pemutakhiran Data Penilaian
Beberapa data pendukung untuk penghitungan nilai PATEN terlambat dikompilasi atau tidak terupdate secara real time, sehingga tidak bisa dilakukan monitoring atas skor indikator
5. Menurunnya jumlah pelayanan yang dilakukan langsung di kecamatan
Dengan layanan digital desa (*Cak Ngateso*), kecamatan menjadi kurang relevan dalam mata rantai pelayanan tertentu, sehingga memengaruhi persepsi maupun data capaian.
6. Kurangnya sarana dan prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.
7. Terbatasnya wewenang dan fungsi kecamatan yang hanya sebatas pada fungsi fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program-program dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terpenuhinya target kinerja program / kegiatan yaitu :

1. Komitmen tinggi dari seluruh aparatur dalam pencapaian kinerja individu dan unit kerja
2. Terselenggaranya implementasi anggaran berbasis kinerja pada seluruh kegiatan sehingga dapat dinilai kinerjanya secara tepat.

3. Meningkatnya kemampuan dan profesionalisme pengelola kegiatan sehingga capaian kinerja masing-masing kegiatan dapat terpenuhi
4. Dukungan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh pimpinan untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan optimal
5. Perencanaan kegiatan PHBN/PHBA yang matang dan terjadwal dengan baik
6. Kerjasama yang solid antar panitia, unsur Forkopimcam, dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan sosial budaya
7. Penanganan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan tepat waktu dan ditindaklanjuti secara responsive
8. Respons cepat dan koordinatif antar lintas sektor (Kecamatan, Polsek, Koramil, Satpol PP, dan instansi teknis terkait) dalam menindaklanjuti laporan kasus
9. Adanya SOP pelaporan dan koordinasi yang jelas, sehingga proses penanganan gangguan trantibum berjalan efektif
10. Sinergi dengan masyarakat dalam memberikan laporan secara cepat dan akurat
11. Pendampingan intensif terhadap desa dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif
12. Aktifnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam mendukung kegiatan desa
13. Pembinaan dan fasilitasi teknis yang dilakukan oleh kecamatan maupun pendamping desa
14. Pembinaan rutin dari kecamatan kepada aparatur desa dalam hal tata kelola keuangan desa
15. Komunikasi dan koordinasi yang baik antara kecamatan dan pemerintah desa.
16. Peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa
17. Dukungan dan komitmen Camat Mojowarno, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Mojowarno untuk mencapai tujuan organisasi

e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.

Gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan di tunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra kecamatan Mojowarno adalah

:

- 1) Konsistensi Capaian Renja Menjadi Modal dalam Mencapai Target Renstra Terpenuhinya seluruh target program dan kegiatan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa desain program dalam Renstra masih relevan dan dapat dioperasikan secara efektif, sehingga:
 - Memperkuat keyakinan terhadap kelayakan dan realisme target kinerja menengah (Renstra).
 - Menjadi dasar justifikasi untuk mempertahankan bahkan meningkatkan target pada tahun berikutnya.

- 2) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Capaian penuh pada aspek ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan umum mencerminkan perbaikan tata kelola, yang berimplikasi pada:
 - Peningkatan nilai evaluasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
 - Terciptanya sistem kerja yang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.
- 3) Peningkatan Ekspektasi Stakeholder terhadap Kinerja Kecamatan Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan akan meningkatkan ekspektasi publik dan pemerintah atasan terhadap peran Kecamatan, yang menuntut:
 - Konsistensi capaian kinerja.
 - Inovasi layanan publik yang berorientasi hasil

f. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tersebut.

Perencanaan program Kabupaten Jombang berisi program- program yang mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Penganggaran yang dituangkan dalam pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan untuk memenuhi kebutuhan program / kegiatan. Program - program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Strategis OPD.

Adapun kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor- faktor penyebab tidak tercapainya target Renja adalah :

1. Menganggarkan sarana dan prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.
2. Menginventarisir Fasilitas layanan publik seperti ruang tunggu, sistem antrean, CCTV dan kelengkapan pendukung lainnya untuk dilaksanakan pemeliharaan
3. Menciptakan inovasi system informasi pendukung operasional pelayanan public, dalam rangka menciptakan kemudahan bagi pengguna layanan.
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Penilai PATEN Kabupaten Jombang terkait kelengkapan data pendukung untuk penghitungan nilai PATEN secara mandiri guna dilakukan evaluasi peningkatan nilai PATEN.
5. Mengajukan usulan penambahan anggaran kepada Tim Anggaran kabupaten Jombang yang dialokasikan untuk penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan layanan dan peningkatan kinerja kecamatan mojawarno, serta pengoptimalan anggaran yang ada.
6. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM
7. Memaksimalkan wewenang dan fungsi fasilitasi dan koordinasi kecamatan guna menyelenggarakan pelayanan publik, memfasilitasi pembangunan pemerintah kabupaten jombang, dengan cara memperkuat dan meningkatkan mekanisme koordinasi antar instansi, baik dengan pemerintah desa, dinas terkait maupun dengan maupun swasta

8. Mengkoordinasikan dengan dinas terkait guna pengiriman SDM pemerintahan desa dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM pemerintahan desa.

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100,10%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan : 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		<i>2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	16 orang/bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan : 2. Pelaksanaan penatausahaan	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD									
7.01.01. 2.02.05	Sub Kegiatan : 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01. 2.06	Kegiatan: <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01. 2.06.01	Sub Kegiatan : 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01. 2.06.02	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01. 2.06.04	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01. 2.06.05	Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01. 2.06.06	Sub Kegiatan : 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01. 2.06.09	Sub Kegiatan : 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	2 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01. .2.07	Kegiatan : <i>Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.01.	Sub Kegiatan :	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	9 unit	37 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07. 10	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Disediakan								
7. 01. 01 .2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7. 01. 01. 2.08. 02	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	24 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7. 01. 01. 2.08. 04	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	25 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7. 01. 01. 2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7. 01. 01. 2.09. 02	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7. 01. 01. 2.09. 09	Sub Kegiatan : 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7. 01. 01. 2.09. 10	Sub Kegiatan : 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 unit	8 unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Nilai Paten Kecamatan	72	92,69	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PELAYANAN PUBLIK									
7.01.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7 01 05 2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	4 laporan	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.05.2.01.03	Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 orang	45 orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.05.2.01.08	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.04.	Kegiatan:	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran	12 kegiatan	12 kegiatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan								
7.01.04. 2.02.01	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	12 laporan	12 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	38 lembaga	38 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.03. 2.01	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.Jumlah Lembaga/Badan Usaha pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	38 lembaga	38 lembaga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.01.03. 2.01.03	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	4 laporan	4 laporan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7 01 06	Kegiatan :	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan	38 dokumen	38 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2025))	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan APB Desa								
7.01.06 .2.01.03	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38 dokumen	38 dokumen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan		1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Mojowarno	76,00	<u>N/A</u>	77,25	77,44	100,25%	<u>77,50</u>	<u>77,50</u>	<u>N/A</u>
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	N/A	100%	100,05%	100,05%	100%	100%	100%
7.01.01. 2.01	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	50%	50%
7.01.01. 2.01. 0001	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dokumen	N/A	2 dokumen	2 dokumen	100 %	3 dokumen	2 dokumen	50 %
7.01.01. 2.01. 0006	Sub Kegiatan : 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 laporan	N/A	5 laporan	5 laporan	100 %	5 laporan	3 laporan	62,5%
7.01. 01.2.02	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	50%	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.02.0001	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	N/A	16 orang/bulan	16 orang/bulan	100%	16 orang/bulan	16 orang/bulan	94,11
7.01.01.2.02.0003	Sub Kegiatan : 2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	36 dokumen	N/A	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	6 dokumen	66,66%
7.01.01.2.02.0005	Sub Kegiatan : 3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	N/A	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	66,66%
7.01.01.2.05	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojowarno	100 %	N/A	100 %	100%	100%	0 %	0 %	100%
7.01.01.2.05.0002	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 paket	N/A	2 paket	2 paket	100%	0 paket	0 paket	22,22%
7.01.01.2.06	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	N/A	100 %	100%	100%	100 %	50 %	100 %
7.01.01.2.06.0001	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 paket	N/A	1 paket	1 paket	100%	6 paket	6 paket	38,88%
7.01.01.2.06.0002	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 paket	N/A	2 paket	2 paket	100%	19 paket	19 paket	29,16%
7.01.01.2.06.0004	Sub Kegiatan : 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	N/A	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
7.01.01.	Sub Kegiatan :	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggunaan yang	4 paket	N/A	2 paket	2 paket	100%	3 paket	3 paket	75%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.06.0005	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disediakan								
7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan : 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	N/A	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
7.01.01.2.06.0009	Sub Kegiatan : 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240 laporan	N/A	17 laporan	17 laporan	100%	16 laporan	16 laporan	13,75%
7.01.01.2.07	Kegiatan : Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>	100 %	N/A	100 %	100%	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.07.0010	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 unit	N/A	30 unit	30 unit	100%	3 unit	3 unit	220%
7.01.01.2.08	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	100 %
7.01.01.2.08.0002	Sub Kegiatan: 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	N/A	24 laporan	24 laporan	100%	24 laporan	12 laporan	66,67%
7.01.01.2.08.0004	Sub Kegiatan : 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	75 laporan	N/A	24 laporan	24 laporan	100%	24 laporan	12 laporan	64%
7.01.01.2.09	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>	100 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	100 %
7.01.01.2.09.0002	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	N/A	7 unit	7 unit	100%	7 unit	2 unit	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan										
7.01.01.2.09.0009	Sub Kegiatan : 2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	N/A	3 unit	3 unit	100%	3 unit	0 unit	100%	
7.01.01.2.09.0010	Sub Kegiatan : 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 unit	N/A	12 unit	12 unit	100%	24 unit	16 unit	120	
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik			2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Mojowarno	5,260	N/A	8,16	8,53	104,53	8,60	N/A	163,49
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	75	N/A	92,70	85,61	92,35 %	85,70	N/A	123,13%	
7.01.02.2.02	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	50 %	100%	
7.01.02.2.02.0003	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36 laporan	N/A	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	66,66 %	
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan Lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	25%	100%	
7.01.03.2.01	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan	1.Jumlah Lembaga/Badan Usaha pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	38 lembaga	N/A	38 lembaga	38 lembaga	100%	38 lembaga	38 lembaga	100%	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<i>Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</i>									
		2.Jumlah desa yang menyusun RKPDes	19 desa	N/A	19 desa	19 desa	100%	19 desa	0 desa	100%
7.01.03.2.01.0001	Sub Kegiatan: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	114 lembaga	N/A	114 lembaga	114 lembaga	100%	114 lembaga	0 lembaga	100%
7.01.03.2.01.0003	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	12 laporan	N/A	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	66,66 %
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	50%	100%
7.01.04.2.02	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait</i>	100 %	N/A	100 %	100%	100%	100 %	50 %	100 %
7.01.04.2.02.0001	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	36 laporan	N/A	12 laporan	12 laporan	100 %	12 laporan	6 laporan	66,66 %
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase PHBN/PHBA dan monev social budaya yang dilaksanakan	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	50 %	100%

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun (n-3) (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) (2025)	Perkiraan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun (n-2) (2024)	Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%) (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) (2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (2025)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	50 %	100%
7 01 05 2.01	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA dan movev social budaya yang dilaksanakan	15 laporan	N/A	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	2 laporan	66,66 %
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	12 dokumen	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	2 dokumen	66,66 %
7 .01. 05 .2.01 .0003	Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 orang	N/A	45 orang	45 orang	100%	45 orang	0 orang	60 %
7 .01. 05 .2.01 .0008	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah dokumen tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 dokumen	N/A	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	2 dokumen	66,67%
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100 %	100%
7 01 06 2.01	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap	19 desa	N/A	19 desa	19 desa	100%	19 desa	19 Desa	100%
7. 01. 06 .2.01. 0003	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38 dokumen	N/A	38 dokumen	38 dokumen	100%	38 dokumen	38 Dokumen	100%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kecamatan Mojowarno merupakan lembaga pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, oleh sebab itu peningkatan penyelenggaraan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Mojowarno, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas adalah merupakan tugas utama.

Secara umum, dasar penyelenggaraan pelayanan publik Kecamatan Mojowarno adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Mojowarno menyelenggarakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 bahwa analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau indikator-indikator lainnya yang sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Dalam hal ini Kecamatan Mojowarno menggunakan indikator yang mencerminkan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi. sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI KECAMATAN			61,80	62,00	N/A	N/A	76,93	N/A	N/A	N/A	
	Nilai Evaluasi SAKIP			74,00	75,00	N/A	N/A	77,44	77,55	N/A	N/A	
1	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur			100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	
1.1	<i>Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan</i>			100	100	N/A	N/A	100	50	N/A	N/A	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3	3	N/A	N/A	2	1	N/A	N/A	
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5	5	N/A	N/A	5	3	N/A	N/A	
1.2	<i>1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu</i>			100	100	N/A	N/A	100	50	N/A	N/A	
	<i>2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan</i>			100	100	N/A	N/A	100	50	N/A	N/A	
1.2.1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			17	17	N/A	N/A	16	16	N/A	N/A	
1.2.2	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD			12	12	N/A	N/A	12	6	N/A	N/A	
1.2.3	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	
1.3	<i>Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Mojowarno</i>			100	100	N/A	N/A	100	50	N/A	N/A	
1.3.1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			3	3	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	
1.4	<i>Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran</i>			100	100	N/A	N/A	100	50	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1.4. 1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			6	6	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	
1.4. 2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			24	24	N/A	N/A	2	3	N/A	N/A	
1.4. 3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	
1.4. 4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4	4	N/A	N/A	2	2	N/A	N/A	
1.4. 5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	
1.4. 6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			80	80	N/A	N/A	17	16	N/A	N/A	
1.5	<i>Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur</i>			100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	
1.5. 1	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1	1	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	
1.5. 2	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5	5	N/A	N/A	30	3	N/A	N/A	
1.6	<i>Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>			100	100	N/A	N/A	100	50	N/A	N/A	
1.6. 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			24	24	N/A	N/A	24	12	N/A	N/A	
1.6. 2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			25	25	N/A	N/A	24	12	N/A	N/A	
1.6. 3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			0	0	N/A	N/A	0	0	N/A	N/A	
1.7	<i>Prosentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</i>			100	100	N/A	N/A	100	50	N/A	N/A	
1.7. 1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajak dan Perizinannya			7	7	N/A	N/A	7	2	N/A	N/A	
1.7. 2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3	3	N/A	N/A	3	0	N/A	N/A	
1.7. 3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			10	10	N/A	N/A	12	16	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
	INDEKS REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN			62	63,45	N/A	N/A	86,20	N/A	N/A	N/A	
	INDEKS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			5,200	5,230	N/A	N/A	8,53	N/A	N/A	N/A	
2	Nilai Paten Kecamatan			73	74	N/A	N/A	85,61	N/A	N/A	N/A	
2.1	<i>Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar</i>			100	100	N/A	N/A	100	50	N/A	N/A	
2.1.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12	12	N/A	N/A	12	6	N/A	N/A	
3	1. Persentase PHBN/PHBA dan monev social budaya yang dilaksanakan			100	100	N/A	N/A	100	50	N/A	N/A	
	2. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti			100	100	N/A	N/A	100	50	N/A	N/A	
3.1	<i>1. Jumlah Laporan Kegiatan PHBN/PHBA dan monev social budaya yang dilaksanakan</i>			5	5	N/A	N/A	5	2	N/A	N/A	
	<i>2. Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam</i>			4	4	N/A	N/A	4	2	N/A	N/A	
3.1.1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			50	50	N/A	N/A	45	0	N/A	N/A	
3.1.2	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			4	4	N/A	N/A	4	2	N/A	N/A	
4	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi Terkait			100	100	N/A	N/A	100	50	N/A	N/A	
4.1	<i>Persentase laporan kordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait</i>			100	100	N/A	N/A	100	50	N/A	N/A	
4.1.1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.			12	12	N/A	N/A	12	6	N/A	N/A	
5	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu			100	100	N/A	N/A	100	100	N/A	N/A	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
5.1	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDesa dengan lengkap			19	19	N/A	N/A	19	19	N/A	N/A	
5.1.1	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa			38	38	N/A	N/A	38	38	N/A	N/A	
6	Persentase desa yang perencanaan pembangunan dan Lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif			100	100	N/A	N/A	100	25	N/A	N/A	
6.1	1. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang dibina			38	38	N/A	N/A	38	38	N/A	N/A	
	2. Jumlah Desa yang menyusun RKPDes			19	19	N/A	N/A	19	0	N/A	N/A	
6.1.1	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4	4	N/A	N/A	4	2	N/A	N/A	
6.1.2	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa			114	114	N/A	N/A	114	0	N/A	N/A	
1	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	-	-	N/A	N/A	77,55	77,60	N/A	N/A	77,55	77,60	
1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	N/A	N/A	2 dokumen	3 dokumen	N/A	N/A	2 dokumen	3 dokumen	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	N/A	N/A	5 dokumen	5 dokumen	N/A	N/A	5 dokumen	5 dokumen	
1.1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	N/A	N/A	2 dokumen	3 dokumen	N/A	N/A	2 dokumen	3 dokumen	
1.1.2	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	N/A	N/A	5 dokumen	5 dokumen	N/A	N/A	5 dokumen	5 dokumen	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1.2	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	N/A	N/A	16 orang/bulan	16 orang/bulan	N/A	N/A	16 orang/bulan	16 orang/bulan	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	N/A	N/A	1 Laporan	1 Laporan	N/A	N/A	1 Laporan	1 Laporan	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	
1.2. 1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	N/A	N/A	16 orang/bulan	16orang/ bulan	N/A	N/A	16 orang/bulan	16orang/ bulan	
1.2. 2	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	N/A	N/A	1 Laporan	1 Laporan	N/A	N/A	1 Laporan	1 Laporan	
1.2. 3	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	N/A	N/A	12 dokumen	12 dokumen	
1.3	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	N/A	N/A	16 paket	16 paket	N/A	N/A	16 paket	16 paket	
1.3. 1	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-	-	N/A	N/A	16 paket	16 paket	N/A	N/A	16 paket	16 paket	
1.4	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	-	-	N/A	N/A	6 paket	6 paket	N/A	N/A	6 paket	6 paket	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	16 paket	16 paket	N/A	N/A	16 paket	16 paket	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	1 paket	1 paket	N/A	N/A	1 paket	1 paket	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	2 paket	2 paket	N/A	N/A	2 paket	2 paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	N/A	N/A	29 laporan	30 laporan	N/A	N/A	29 laporan	30 laporan	
1.4. 1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	-	-	N/A	N/A	6 paket	6paket	N/A	N/A	6 paket	6paket	
1.4. 2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	16 paket	16 paket	N/A	N/A	16 paket	16 paket	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1.4. 3	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	1 paket	1 paket	N/A	N/A	1 paket	1 paket	
1.4. 4	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	2 paket	2 paket	N/A	N/A	2 paket	2 paket	
1.4. 5	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	N/A	N/A	1 dokumen	1 dokumen	
1.4. 6	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	N/A	N/A	29 laporan	30 laporan	N/A	N/A	29 laporan	30 laporan	
1.5	<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	-	-	N/A	N/A	1 unit	0 unit	N/A	N/A	1 unit	0 unit	
	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	-	-	N/A	N/A	136 unit	10 unit	N/A	N/A	136 unit	10 unit	
1.5. 1	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	1 unit	0 unit	N/A	N/A	1 unit	0 unit	
1.5. 2	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	136 unit	10 unit	N/A	N/A	136 unit	10 unit	
1.6	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	-	-	N/A	N/A	24 laporan	24 laporan	N/A	N/A	24 laporan	24 laporan	
	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	-	-	N/A	N/A	24 laporan	24 laporan	N/A	N/A	24 laporan	24 laporan	
1.6. 1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	24 laporan	24 laporan	N/A	N/A	24 laporan	24 laporan	
1.6. 2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	N/A	N/A	24 laporan	24 laporan	N/A	N/A	24 laporan	24 laporan	
1.7	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	-	-	N/A	N/A	7 unit	7 unit	N/A	N/A	7 unit	7 unit	
	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	-	-	N/A	N/A	3 unit	3 unit	N/A	N/A	3 unit	3 unit	
	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	-	-	N/A	N/A	10 unit	10 unit	N/A	N/A	10 unit	10 unit	
1.7. 1	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	N/A	N/A	7 unit	7 unit	N/A	N/A	7 unit	7 unit	
1.7. 2	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	N/A	3 unit	3 unit	N/A	N/A	3 unit	3 unit	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
1.7. 3	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	N/A	N/A	10 unit	10 unit	N/A	N/A	10 unit	10 unit	
2	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	-	N/A	N/A	76,50%	77,00%	N/A	N/A	76,50%	77,00%	
2.1	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	-	-	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	
	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	-	-	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	
2.1. 1	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	-	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	
2.1. 2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	N/A	N/A	12 Laporan	12 Laporan	
3	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	-	N/A	N/A	75,50%	76,00%	N/A	N/A	75,50%	76,00%	
3.1	<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kecamatan</i>	-	-	N/A	N/A	114 lembaga	114 lembaga	N/A	N/A	114 lembaga	114 lembaga	
	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	-	-	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	
3.1. 1	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kecamatan	-	-	N/A	N/A	114 lembaga	114 lembaga	N/A	N/A	114 lembaga	114 lembaga	
3.1. 2	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	N/A	N/A	4 laporan	4 laporan	
4	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	N/A	N/A	49,50%	50,00%	N/A	N/A	49,50%	50,00%	
4.1	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.</i>	-	-	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
4.1. 1	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	-	-	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	N/A	N/A	12 laporan	12 laporan	
5	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	N/A	N/A	75,50%	76,00%	N/A	N/A	75,50%	76,00%	
5.1	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	-	-	N/A	N/A	45 orang	45 orang	N/A	N/A	45 orang	45 orang	
	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	-	-	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	
5.1. 1	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	-	-	N/A	N/A	100 orang	100 orang	N/A	N/A	100 orang	100 orang	
5.1. 2	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	N/A	N/A	4 dokumen	4 dokumen	
6	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-	N/A	N/A	75,50%	76,00%	N/A	N/A	75,50%	76,00%	
6.1	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	-	-	N/A	N/A	38 dokumen	38 dokumen	N/A	N/A	38 dokumen	38 dokumen	
6.1. 1	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	-	N/A	N/A	38 dokumen	38 dokumen	N/A	N/A	38 dokumen	38 dokumen	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mojowarno, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, atas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mojowarno berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mojowarno tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Mojowarno., meliputi:

1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD

Tingkat Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Mojowarno setiap tahun semakin meningkat hal ini bisa dilihat dari capaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) yang setiap tahun semakin meningkat. Adapun hal kritis yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Mojowarno adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, adalah:

- a) Lemahnya pemahaman aparatur desa terhadap tata kelola pemerintahan desa/kelurahan.
Masih terdapat aparatur desa yang belum memahami secara optimal regulasi, prosedur administrasi, dan prinsip akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa/kelurahan. Hal ini berdampak pada keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta ketidaksesuaian dengan standar pelayanan minimal (SPM)
- b) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kecamatan.
Ketersediaan aparatur dengan kompetensi teknis dan manajerial yang memadai masih terbatas, sehingga beban kerja tidak sebanding dengan kapasitas SDM yang ada. Kondisi ini menghambat efektivitas pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat
- c) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja kecamatan.
Sarana kerja, fasilitas teknologi informasi, dan infrastruktur pelayanan belum sepenuhnya memadai. Hal ini mengurangi efisiensi dan kecepatan pelayanan publik, serta berdampak pada rendahnya produktivitas unit kerja
- d) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Perubahan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan berkualitas belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh kapasitas pelayanan yang tersedia
- e) Belum ada sistem informasi yang terintegrasi pada tingkat kecamatan ke desa
Sistem informasi yang menghubungkan kecamatan dan desa secara real-time belum terbangun, sehingga alur data, koordinasi, dan pengawasan berjalan lambat dan berpotensi menimbulkan duplikasi atau ketidaktepatan data

- f) Kurangnya pembinaan Desa terhadap Badan Usaha dan Lembaga Pemberdayaan Desa/kelurahan sehingga kurang berkembang dan tidak dapat berjalan sebagaimana fungsinya

Pembinaan, monitoring, dan pendampingan belum optimal, mengakibatkan BUMDes dan LPMD kurang berkembang, tidak berinovasi, dan tidak mampu menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi dan sosial secara maksimal

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mojowarno, isu strategis yang perlu menjadi prioritas perencanaan adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kualitas dan kuantitas SDM masih terbatas, baik di lingkungan kecamatan maupun desa/kelurahan. Keterbatasan kompetensi teknis, manajerial, dan pemahaman regulasi menyebabkan rendahnya efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Hal ini berdampak pada rendahnya daya adaptasi terhadap kebijakan baru, teknologi informasi, dan tuntutan pelayanan yang semakin kompleks.

- b) Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik, seperti fasilitas ruang pelayanan, peralatan teknologi informasi, jaringan komunikasi, dan transportasi operasional, belum sepenuhnya memadai. Kondisi ini menghambat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

- c) Peran BUMDesa, BUMDesma, Lembaga Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang Belum Optimal dalam Pembangunan Desa
Pembinaan dan pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), serta lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan belum berjalan maksimal. Akibatnya, lembaga-lembaga ini belum mampu berperan secara signifikan sebagai motor penggerak ekonomi desa maupun sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

- d) Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial Masyarakat
Perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, serta arus globalisasi memerlukan upaya penguatan wawasan kebangsaan dan ketahanan sosial masyarakat. Penguatan ini penting untuk menjaga persatuan, kerukunan, dan nilai-nilai kebhinekaan di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals) adalah:
- a. Dampak terhadap pencapaian visi dan isi Kepala Daerah :

Lemahnya kualitas SDM akan berpengaruh pada efektivitas pelayanan publik, ketepatan perencanaan, dan kualitas pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan, sehingga menghambat terwujudnya pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagaimana visi kepala daerah yaitu mewujudkan jombang maju dan Sejahtera untuk semua . Kekurangan sarana prasarana berdampak pada lambatnya proses layanan, menurunnya kepuasan masyarakat, dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah . Belum optimalnya peran Peran BUMDesa, BUMDesma, Lembaga, dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan akan menghambat misi peningkatan kemandirian ekonomi desa dan pemerataan pembangunan berbasis potensi lokal . Lemahnya wawasan kebangsaan dapat menurunkan rasa persatuan, mengganggu harmonisasi sosial, serta melemahkan stabilitas daerah yang menjadi prasyarat pencapaian visi pembangunan daerah Memperkuat struktur pemerintahan di tingkat kecamatan, memungkinkan pelaksanaan kebijakan dan program yang lebih efektif dan terkoordinasi. Hal ini mendukung visi kepala daerah dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan mampu memberikan pelayanan publik yang baik, sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemenuhan layanan dasar dan kehidupan yang harmonis, peningkatan layanan public dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.

- b. Penyelenggaraan Tusi Kecamatan dapat memiliki dampak terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku dalam konteks pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. NSPK mengatur standar kompetensi aparatur desa/kecamatan, sehingga rendahnya kualitas SDM dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan . Begitu pula fasilitas pelayanan yang memadai merupakan bagian dari pemenuhan standar teknis penyelenggaraan pelayanan public. NSPK dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa menetapkan pedoman pembinaan dan pengembangan BUMDes, yang akan sulit dipenuhi bila peran BUMDesa/BUMDesma belum maksimal., sedangkan NSPK di bidang pemerintahan desa mencakup penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi perangkat dan masyarakat desa.
- c. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan secara efektif berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia berisiko menghambat pemenuhan SPM, khususnya pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kekurangan sarana dan prasarana juga dapat menghambat pencapaian indikator SPM di bidang administrasi pemerintahan maupun pelayanan dasar lainnya. Lemahnya peran lembaga ekonomi desa berdampak pada ketidakmampuan memenuhi SPM terkait aspek kesejahteraan masyarakat. Meskipun tidak

secara langsung berkaitan dengan SPM pelayanan dasar, faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi terciptanya kondisi sosial yang kondusif untuk mendukung pelayanan publik implementasi Tusi kecamatan yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat kecamatan. Hal ini termasuk pemenuhan SPM dalam hal aksesibilitas layanan, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, dan kualitas hasil layanan yang disediakan

- d. Isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Mojowarno memiliki peran signifikan dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tingkat lokal. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat selaras dengan SDGs poin 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*) melalui penguatan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif. Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik serta inovasi pelayanan sejalan dengan SDGs poin 9 (*Industry, Innovation, and Infrastructure*) dan poin 11 (*Sustainable Cities and Communities*). Upaya pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing wilayah melalui pengoptimalan peran BUMDesa, BUMDesma, Lembaga, dan Pemberdayaan Desa/Kelurahan berkontribusi pada SDGs poin 8 (*Decent Work and Economic Growth*) serta poin 1 (*No Poverty*). Selain itu, penguatan wawasan kebangsaan melalui pengarusutamaan pendidikan dan literasi pembangunan berkelanjutan, toleransi, dan budaya damai relevan dengan SDGs target 4.7, yang mendukung pembentukan masyarakat berpengetahuan, inklusif, dan berdaya saing. Program Tusi Kecamatan juga mendukung pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender di tingkat lokal, yang mencakup kebijakan untuk mendukung partisipasi aktif kaum perempuan dan kaum termarginalkan dalam proses perencanaan dan pembangunan di tingkat kecamatan. Dengan mengadopsi pendekatan PPRG, diharapkan pembangunan dapat lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang merata bagi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan komitmen global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 5 yang menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kecamatan Mojowarno dapat diuraikan sebagai berikut

Tantangan :

- a. Keterbatasan Anggaran dan Alokasi Pembiayaan: Dana operasional untuk kecamatan dan pembinaan desa sering terbatas atau tidak sesuai kebutuhan riil, menghambat pengadaan sarana, pelatihan SDM, dan inovasi layanan

- b. Kapasitas Sumber Daya Manusia : Tantangan lainnya adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai di tingkat kecamatan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan, termasuk dalam hal pengetahuan teknis, manajemen proyek, dan administrasi
- c. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
- d. Jaringan Internet yang masih terkadang crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
- e. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- f. Kurang memadainya Gedung kantor sebagai tempat kerja melaksanakan tugas pelayanan.
- g. Keterlibatan Masyarakat: Tantangan lainnya adalah kurangnya keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelayanan kecamatan

Peluang :

- a. Efisiensi Anggaran dan Prioritisasi Program: Menyusun skala prioritas berbasis kebutuhan mendesak dan dampak terbesar, serta memangkas kegiatan seremonial yang tidak urgen.
- b. Pengembangan Kapasitas SDM: Investasi dalam pengembangan kapasitas SDM di kecamatan, melalui pelatihan dan pendidikan formal, dapat meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dan penyediaan layanan public
- c. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
- d. Teknologi dan Inovasi: Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat meningkatkan efisiensi administrasi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik di kecamatan
- e. Mengoptimalkan petugas pelayanan yang ada dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas melalui pengikutsertaan dalam pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun, inovatif, gesit, akuntabel dan profesional;
- f. Kemitraan dan Kolaborasi: Peluang untuk membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan sumber daya, pengetahuan, dan dukungan untuk meningkatkan pelayanan kecamatan.

Dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ada, pelayanan kecamatan dapat ditingkatkan secara signifikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik dan berkelanjutan. Langkah-langkah strategis seperti meningkatkan keterlibatan masyarakat, memanfaatkan teknologi, dan memperkuat kapasitas SDM menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan,
- a. Perencanaan Pembangunan
 - Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2025, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kab. Jombang.
 - Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui forum konsultasi publik untuk mendapatkan saran dan masukan yang lebih aspiratif.
 - Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
 - b. Integrasi Sistem Informasi Kecamatan - Desa

Perlunya sinergi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Jombang guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta pengembangan aplikasi pelayanan dan pelaporan terintegrasi berbasis real-time yang terkoneksi antara kecamatan, desa, dan sistem SPBE kabupaten, disertai peningkatan kapasitas operator desa dan kecamatan dibidang teknologi informasi.
 - c. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Kepala Daerah Kabupaten Jombang sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Mojowarno pada tahun 2024 melaksanakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dijabarkan dalam 6 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 12 Kegiatan dan 25 subkegiatan serta telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program, kegiatan dan subkegiatan maupun realisasi

Adapun salah satu tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. Maksud dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk mempertegas dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat sebagai Perangkat Daerah. Adapun tujuan dilimpahkannya sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Camat
 - d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diperlukan pembinaan dan pendampingan intensif dan bimbingan teknis pengelolaan usaha serta Fasilitasi kerja sama BUMDes dengan pelaku usaha dan lembaga permodalan , selain itu perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap program pemberdayaan masyarakat dan desa untuk memastikan efektivitas dan dampak positif yang dihasilkan

- e. Tantangan sosial dan penguatan wawasan kebangsaan
Perlunya dijadwalkan kegiatan Sosialisasi nilai kebangsaan, toleransi, ketahanan sosial dengan memperhatikan juga kesetaraan gender melalui forum warga, PKK, Karang Taruna, dan LPMD, juga Kolaborasi dengan TNI/Polri dan tokoh agama

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan rencana kerja OPD tidak hanya menjadi praktik terbaik, tetapi juga menjadi kunci untuk mencapai hasil yang optimal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi serta masyarakat yang dilayani. Membandingkan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan rencana kerja sangatlah penting untuk memastikan beberapa hal yaitu :

1. Kesesuaian dengan Tujuan Strategis: Rencana kerja OPD harus selaras dengan tujuan strategis organisasi. Dengan membandingkan rancangan awal (yang biasanya mencakup rencana aksi atau strategi yang direncanakan) dengan hasil analisis kebutuhan, OPD dapat memastikan bahwa semua inisiatif yang diusulkan atau proyek yang direncanakan akan mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Memastikan konsistensi antara analisis kebutuhan dan rancangan awal membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan mengetahui bahwa setiap langkah dalam rencana kerja didasarkan pada kebutuhan yang sudah dipelajari dan dipahami dengan baik, OPD dapat menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan anggaran pada inisiatif yang tidak relevan atau tidak efektif.
3. Pemenuhan Kebutuhan Stakeholder: Analisis kebutuhan mencakup pemahaman yang mendalam tentang apa yang diinginkan dan diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Dengan membandingkan rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan, OPD dapat memastikan bahwa rencana kerja mereka mencerminkan prioritas dan kebutuhan utama dari semua pihak yang terlibat, seperti masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah.
4. Pengukuran Kemajuan dan Evaluasi Kinerja: Memiliki rancangan awal yang sesuai dengan analisis kebutuhan memungkinkan OPD untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas. Ini membantu dalam memantau kemajuan implementasi rencana kerja dan mengevaluasi apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai sesuai dengan harapan.

5. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Membandingkan rancangan awal dengan analisis kebutuhan tidak hanya mendukung transparansi dalam proses perencanaan OPD, tetapi juga meningkatkan tingkat akuntabilitas. Dengan menunjukkan bagaimana setiap langkah dalam rencana kerja dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan yang solid, OPD dapat memberikan justifikasi yang kuat kepada pemangku kepentingan dan masyarakat umum mengenai penggunaan sumber daya publik dan manfaat yang diharapkan.

Secara umum, berdasarkan pemilahan dan pembahasan pada Forum OPD dan berpedoman pada pelaksanaan Renja tahun lalu, seluruh usulan program, kegiatan dan subkegiatan dari masyarakat telah selaras dengan analisis kebutuhan, sebagaimana telah direncanakan oleh Kecamatan Mojowarno pada rancangan awal renja 2026. Hanya saja terdapat perbedaan terkait besaran pendanaan, hal ini tentunya dikarenakan APBD Kabupaten Jombang yang terbatas.

Adapun perbandingan antara rancangan awal renja 2026 Kecamatan Mojowarno dengan hasil analisis kebutuhan disajikan dalam tabel berikut :

TABEL 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Mojowarno Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Mojowarno	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	77,55	8.575.857.128	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Kec. Mojowarno	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	77,60	2.858,458.300	
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojowarno	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	6.178.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Mojowarno	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	7.000.000	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan		
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec mojawarno	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2dokumen	4.978.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec mojawarno	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	6.000.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	1.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	1.000.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec mojawarno	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bulan	2.323.528.828	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec mojawarno	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bulan	2.483.398.000	
			Jumlah Laporan	1				Jumlah Laporan	1 Laporan		

			<i>Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Laporan</i>				<i>Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>			
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 dokumen</i>				<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 dokumen</i>		
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec mojawarno	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bulan	2.240.420.826	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec mojawarno	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bulan	2.400.000.000	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec mojawarno	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	82.398.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec mojawarno	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	82.398.000	
1.3	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Kec mojawarno</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>16 paket</i>	<i>9.600.000</i>	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Kec mojawarno</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>16 paket</i>	<i>-</i>	
1.3.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec mojawarno	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	16 paket	9.600.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec mojawarno	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	16 paket	-	
1.3	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Kec mojawarno</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan bangunan kantor yang terfasilitasi</i>	<i>6 paket</i>	<i>108.083.250</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Kec mojawarno</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan bangunan kantor yang terfasilitasi</i>	<i>6 paket</i>	<i>114.083.250</i>	
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>16 paket</i>				<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>16 paket</i>		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 laporan				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 laporan		
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec mojawarno	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	6 paket	3.202.600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec mojawarno	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	6 paket	4.202.600	
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec mojawarno	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	10.668.650	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec mojawarno	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	11.668.650	
1.3.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec mojawarno	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	62.358.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Kec mojawarno	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	63.358.000	
1.3.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec mojawarno	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3.310.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec mojawarno	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	4.310.000	
1.3.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec mojawarno	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2,352,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec mojawarno	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.352.000	
1.3.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	29 laporan	26.192.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	29 laporan	27.192.000	

			Konsultasi SKPD					SKPD			
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec mojawarno	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	5.971.994.650	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec mojawarno	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	92.494.650	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	136 unit				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	136 unit		
1.4.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec mojawarno	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	5.880.500.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec mojawarno	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	
1.4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec mojawarno	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	136 unit	91.494.650	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Kec mojawarno	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	136 unit	92.494.650	
1.6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	105.180.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	107.180.000	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan		
1.6.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	36.540.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	37.540.000	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	68.640.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	69.640.000	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec mojawarno	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	7 unit	51.302.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec mojawarno	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	54.302.400	

			<i>dan Perizinannya</i>								
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>3 unit</i>				<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>3 unit</i>		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>10 unit</i>				<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>10 unit</i>		
1.7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec mojawarno	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	31.171.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kec mojawarno	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	32.171.000	
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec mojawarno	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	10.471.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec mojawarno	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	11.471.400	
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec mojawarno	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	9.660.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec mojawarno	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	10.660.000	
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec mojawarno	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76,50%	9.800.000	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec mojawarno	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	77,00%	13.787.500	
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	9.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	13.787.500	

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		
2.1.1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kecamatan	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4.000.000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kecamatan	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Kecamatan	4 laporan	5.000.000	
2.1.2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	5.800.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	10.800.000	
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec mojawarno	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,50%	164.902.500	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec mojawarno	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	76,00%	165.908.000	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec mojawarno	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di DesaKecamatan	114 lembaga	164.902.500	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec mojawarno	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di DesaKecamatan	114 lembaga	165.908.000	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan		
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec mojawarno	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di DesaKecamatan	114 lembaga	17.000.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec mojawarno	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di DesaKecamatan	114 lembaga	17.005.500	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Peningkatan	4 laporan	147.902.500	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas	4 laporan	148.902.500	

	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
4	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kec mojawarno	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umum	49,50%	7.950.000	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Kec mojawarno	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umu	50,00%	8.950.000	
4.1	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Kec mojawarno</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.</i>	<i>12 laporan</i>	<i>7.950.000</i>	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Kec mojawarno</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.</i>	<i>12 laporan</i>	<i>8.950.000</i>	
4.1.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	7.950.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec mojawarno	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	8.950.000	
5	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec mojawarno	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75,50%	81.316.000	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kec mojawarno	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	76,00%	226.135.000	
5.1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Kec mojawarno</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	<i>45 orang</i>	<i>81.316.000</i>	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Kec mojawarno</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	<i>45 orang</i>	<i>226.135.000</i>	
		<i>Kec mojawarno</i>	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	<i>4 dokumen</i>			<i>Kec mojawarno</i>	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	<i>4 dokumen</i>		
5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec mojawarno	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	28.216.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec mojawarno	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	172.035.000	

5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec mojawarno	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	53.100.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec mojawarno	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	54.100.000	
6	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec mojawarno	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,50%	20.862.500	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec mojawarno	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	76,00%	21.862.500	
6.1	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Kec mojawarno</i>	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>38 dokumen</i>	<i>20.862.500</i>	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Kec mojawarno</i>	<i>Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>38 dokumen</i>	<i>21.862.500</i>	
6.1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec mojawarno	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38 dokumen	20.862.500	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec mojawarno	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38 dokumen	21.862.500	
			TOTAL		8.779.372.128				TOTAL	3.297.113.800	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD Kabupaten.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan Mojowarno sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan rencana kerja Kecamatan Mojowarno didiskusikan dalam pembahasan Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat telah diselaraskan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Mojowarno dengan mempertimbangkan aspek-aspek kajian kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan jumlah anggaran, serta tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan.

Dari proses penyelarasan beberapa isu penting yang diekspose dalam dokumen ini dengan usulan program dan kegiatan masyarakat, telah dituangkan beberapa kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 yang berkaitan dengan :

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana strategis yang bersifat aspiratif, maka akan diadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam penyusunan Renja dan Renstra.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan yang bersifat aspiratif, dan telah diakomodir dengan pelaksanaan forum konsultasi public (FKP) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
- c. Perencanaan tahun 2026 telah mengadopsi pendekatan PPRG, agar pembangunan dapat lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang merata bagi perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang menargetkan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan
- d. Pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan koordinasi , monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program social budaya di seluruh Desa.

- e. Pelaksanaan program yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum adalah meningkatkan koordinasi / sinergi dengan dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Perda/Perkada, Penegakan Peraturan Perundangan dan atu kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Penyelenggaraan program yang berkaitan dengan pendelegasian wewenang Bupati adalah fasilitasi penyelenggaraan PATEN yang sesuai standard, yang telah di akomodir dengan meningkatkan efektifitas pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan.
- g. Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai bahan dalam penyusunan monografi kecamatan, dengan mengoptimalkan peran perangkat desa yang dinamis sebagai petugas *collecting data*,
- h. Pemerataan pembangunan fisik untuk mereduksi ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah sekaligus memberdayakan sumber daya lokal melalui prioritas dan pemanfaatan penggunaan produk lokal dalam Kabupaten.

Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan diperoleh melalui usulan pemangku kepentingan pada pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan dimana pendanaanya diambilkan dari Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK), sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program, Kegiatan dan subkegiatan dari para pemangku kepentingan Tahun 2026

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Desa Mojowangi		19 titik	
2	Peningkatan Jalan Kabupaten	Desa Grobogan		165 meter	
3	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Desa Selorejo		19 titik	
4	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Desa Catakayam		19 titik	
5	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Desa Gedangan		19 titik	
6	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Desa Menganto		19 titik	
7	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Desa Wringinpitu		19 titik	
8	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Desa Karanglo		19 titik	
9	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Desa Rejoslamet		19 titik	
10	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Desa Japanan		19 titik	

BAB III

TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menjadi acuan strategis bagi seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pemerintah daerah dan kecamatan, dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Di tingkat daerah, prioritas nasional diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Jombang, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk Kecamatan Mojowarno.

- a. Visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024–2029 sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diwujudkan melalui 8 (delapan) (Misi) Agenda Pembangunan yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu :
 - 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
 - 2) Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara; mendorong kemandirian melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
 - 3) Meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mengembangkan kewirausahaan, industri kreatif, serta memperkuat infrastruktur dasar.
 - 4) Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
 - 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik.
 - 6) Bangun dari desa dan dari bawah: pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
 - 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi; serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
 - 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya; meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
- b. Tema pembangunan RKP Nasional tahun 2026 adalah: “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.

c. Adapun prioritas pembangunan nasional tahun 2026 yang disampaikan Pemerintah dalam penyelenggaraan musrenbang nasional penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, yaitu :

1. Kedaulatan Pangan dan Energi

Fokus pada ketahanan nasional melalui optimasi Bulog, pembangunan *food estate*, pengembangan energi terbarukan, SPAM terpadu, dan pengelolaan sampah untuk mendukung ketahanan sektor kritikal

2. Ekonomi yang Produktif dan Inklusif

Mencakup program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan deregulasi demi memperkuat pendidikan, kesehatan, dan iklim investasi

3. Pertahanan Semesta dan Inovasi

Memperkuat ketahanan nasional melalui inovasi teknologi, hilirisasi sumber daya alam, dan pengentasan kemiskinan lewat program seperti 3 juta rumah dan Koperasi Desa Merah Putih

4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

Mendukung target pertumbuhan sebesar 6,3%, pengentasan kemiskinan, dan penguatan SDM melalui inisiatif transformatif yang berorientasi pada hasil nyata

5. Fiskal Adaptif dan Stabilitas Makroekonomi

Meliputi efisiensi belanja negara, subsidi tepat sasaran, dukungan fiskal kepada sektor prioritas seperti sekolah unggulan, koperasi desa, serta stabilitas defisit sekitar 2,5% dari PDB

Dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas nasional tersebut, Kecamatan Mojowarno memposisikan diri sebagai simpul koordinasi pemerintahan yang mampu menjembatani program nasional dengan kebutuhan lokal. Implementasi kebijakan nasional pada tingkat Kecamatan diarahkan untuk: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar kepada Masyarakat, Memperkuat peran kelembagaan desa/kelurahan sebagai motor penggerak Pembangunan, Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis data, Menumbuhkan partisipasi masyarakat dan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pembangunan

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 dilakukan untuk memastikan keselarasan antara rencana kerja Kecamatan Mojowarno dengan arah kebijakan pembangunan daerah provinsi. Penyelarasan ini mengacu pada dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, yang menekankan prioritas pembangunan daerah melalui penguatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan wilayah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Visi Provinsi Jawa Timur tahun 2025- 2029 adalah "Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045" Visi ini menjadi landasan strategis dalam menyelaraskan seluruh program pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota, serta turut mendukung pencapaian visi nasional menuju *Indonesia Emas 2045* . Sedangkan Misi Provinsi Jawa Timur tahun 2025- 2029 memuat sembilan misi pembangunan, yang dikenal sebagai Nawa Bhakti Satya, yaitu :

- 1) Jatim Sejahtera – Mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menekan ketimpangan.
- 2) Jatim Kerja – Menciptakan lapangan kerja yang luas dan berkualitas.
- 3) Jatim Akses – Memperkuat konektivitas dan infrastruktur antardaerah secara merata.
- 4) Jatim Agro – Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan
- 5) Jatim Cerdas – Memperluas akses dan mutu pendidikan secara adil.
- 6) Jatim Sehat – Meningkatkan layanan kesehatan yang mudah diakses dan berkualitas.
- 7) Jatim Berkah Amanah – Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan partisipatif.
- 8) Jatim Harmoni – Menjaga masyarakat yang inklusif, toleran, dan rukun.
- 9) Jatim Lestari – Melindungi lingkungan hidup demi pembangunan berkelanjutan

Dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jatim 2025–2029 serta serta dengan memperhatikan prioritas pembangunan pusat dan strategi jangka panjang RPJPD Jatim 2025–2045 sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelarasan antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Mendasar hal tersebut, maka ditetapkan tema RKPD Tahun 2026 adalah “Memperkuat Daya Saing Ekonomi, Pemerataan Pembangunan, dan Kesejahteraan Masyarakat Berkelanjutan”.

Gubernur Jatim menyoroti beberapa program strategis yang menjadi fokus tahun 2026, yakni:

1. Integrasi Data Tunggal Sosial-Ekonomi
2. Mudik Gratis Terintegrasi
3. Peningkatan Layanan Trans Jatim
4. Percepatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan
5. Penguatan Kompetensi Talenta Milenial
6. Perluasan Pembiayaan UMKM
7. Pemeliharaan Infrastruktur Jalan (Program “Sapu Bersih”)
8. Penguatan Ekonomi Kreatif (Program “Desa Berdaya”)
9. Antisipasi Musim Kemarau dan Penanganan Bencana

Dengan mengacu pada arah kebijakan Provinsi Jawa Timur tersebut, Kecamatan Mojowarno menetapkan fokus strategis untuk: Memperkuat kapasitas kelembagaan kecamatan dan desa sebagai pusat pelayanan public, Mengoptimalkan potensi lokal melalui kemitraan dan inovasi berbasis teknologi, Memastikan pemerataan pembangunan

antarwilayah di lingkup kecamatan, Mendukung pencapaian target pembangunan provinsi yang selaras dengan sasaran nasional dan SDGs

1.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang

Prioritas pembangunan Kabupaten Jombang tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, hasil evaluasi pembangunan serta arah kebijakan pembangunan tahun 2024. Selain itu juga memperhatikan keselarasan target indikator makro, kebijakan nasional serta Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan rumusan tersebut, adanya penekanan arah kebijakan setiap tahun selanjutnya dirumuskan tema pembangunan tahunan guna mendorong penguatan daya saing sumber daya manusia dan ekonomi yang ada di Kabupaten Jombang mengingat disektor agro/pertanian yang cukup potensial untuk dikembangkan. Mendasar telaahan diatas dirumuskan tema RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2026 adalah "Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Strategis".

Selanjutnya dari tema pembangunan tersebut diwujudkan melalui langkah konkrit untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditargetkan pada tahun 2026 kedalam 4 (empat) prioritas pembangunan, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan Kemandirian Desa serta Kehidupan Masyarakat yang Harmonis
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
4. Peningkatan Akses Infrastruktur yang Mendukung Pertumbuhan ekonomi dan Kualitas Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2026 yang mengusung tema "*Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Strategis*" selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, khususnya dalam aspek fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan desa. Peningkatan kualitas SDM dapat diimplementasikan melalui pelatihan aparatur kecamatan dan desa, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Prioritas peningkatan kemandirian desa dan kehidupan masyarakat yang harmonis sejalan dengan peran kecamatan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran BUMDes. Penguatan tata kelola pemerintahan relevan dengan fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara itu, peningkatan akses infrastruktur mendukung tugas kecamatan dalam memfasilitasi pelayanan publik yang efektif dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Jombang Kecamatan Mojowarno melaksanakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka program kegiatan di

Kecamatan Mojowarno mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih tahun periode 2025-2029. Adapun Visi Bupati Jombang Tahun 2025-2029 adalah **‘MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA’**. Dalam mendukung visi tersebut Kecamatan mendukung pencapaian misi ke 5 yaitu “Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif” Tujuan Pembangunan Daerah yang ke-5, yakni: “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital serta pelayanan publik merata ” dengan sasaran “Tersedianya kebijakan dan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif”

Guna mendukung Prioritas Pembangunan Daerah tersebut maka dalam menjalankan tugasnya ditetapkan tujuan dan sasaran dari Rencana Kerja OPD, dimana tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Mojowarno adalah : “Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan” dengan indikator Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Sasaran kinerja yang telah direncanakan disusun indikator kinerja dan formulasi perhitungannya. Maka Sasaran Kinerja Kecamatan Mojowarno adalah “1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik “ dan “2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif” dengan indikator sasaran : 1) Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Mojowarno, 2) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kec. Mojowarno.

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran Kecamatan Mojowarno

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TAHUN 2026
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan		Indeks Kualitas Kinerja Kecamatan	75.10
		1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Indeks Kualitas Pelayanan Publik	8.55
		2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif	2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	76,95

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

- Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Mojowarno diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Bupati terpilih tahun periode 2025-2029. Adapun Visi Bupati Jombang Tahun 2025-2029 adalah **‘MEWUJUDKAN JOMBANG MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA’** pencapaian misi ke 5 yaitu “Menghadirkan transformasi tata kelola pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif” Untuk Kecamatan difokuskan pada sasaran RPJMD ke 14 yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital serta pelayanan publik merata” yang selaras dengan tujuan OPD yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berbasis Digital serta pelayanan publik merata” dan Sasaran Kinerja Kecamatan Mojowarno adalah “1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik” dan “2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi yang bersih dan efektif” dengan indikator sasaran : 1) Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kec. Mojowarno, 2) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kec. Mojowarno

➤ **Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals)**

SDGs adalah merupakan program pembangunan yang berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Mojowarno diimplementasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

➤ **Pengentasan Kemiskinan**

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Jombang. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Mojowarno. Program dan kegiatan yang dirancang pada Renja 2026 Kecamatan Mojowarno yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses/fasilitasi dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan.

➤ **Penurunan Stunting**

Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis yang terjadi pada anak-anak akibat dari asupan gizi yang tidak memadai dalam jangka waktu yang panjang, terutama pada periode pertumbuhan dan perkembangan awal mereka, yaitu dari konsepsi sampai usia 2 tahun. Kondisi ini dapat mengakibatkan anak mengalami pertumbuhan yang terhambat, di mana tinggi badan mereka tidak mencapai potensi genetik mereka secara penuh. Kecamatan

sebagai menjadi koordinator utama dalam mengimplementasikan program-program penurunan stunting yang dicanangkan oleh pemerintah pusat atau daerah. dengan mengkoordinasikan berbagai instansi terkait seperti pemerintah desa, puskesmas, dinas kesehatan, dinas pendidikan, organisasi dan lembaga masyarakat, melalui pelaksanaan kegiatan monev sosial budaya yang telah tercantum dalam rencana kerja ini.

➤ Peningkatan Keadilan dan Kesetaraan Gender

Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) adalah pendekatan dalam perencanaan pembangunan yang memastikan bahwa kebijakan, program, dan proyek pembangunan memperhatikan dan mengintegrasikan dimensi gender secara sistematis. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketimpangan gender, mempromosikan kesetaraan gender, dan meningkatkan kesejahteraan perempuan dan laki-laki secara merata. Program, kegiatan dan subkegiatan pada Renja 2026 Kecamatan Mojowarno telah mengakomodir perspektif gender dengan baik, hal ini terlihat dari pelaksanaan Forum OPD dan Forum Konsultasi Publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, serta fasilitasi dan koordinasi pembinaan kegiatan Pemberdayaa Kesejahteraan Keluarga (PKK), dimana terdapat partisipasi aktif perempuan dan laki-laki serta kaum termarginalkan dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan program pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi semua kelompok masyarakat dipertimbangkan.

➤ Pencapaian NSPK dan SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program, Kegiatan dan subkegiatan di Kecamatan Mojowarno diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

➤ Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Mojowarno sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Jombang memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan pembuatan genteng dan batubata, pengrajin dompet, dan sektor pertanian baik padi, jagung, sayur serta tembakau pada musim tertentu. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Mojowarno melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini. Program, kegiatan dan subkegiatan pada Renja 2026 Kecamatan Mojowarno telah mengakomodir prespektif pendayagunaan potensi ekonomi daerah , hal ini tampak dalam kegiatan gelar potensi. Gelar Potensi Desa bukan hanya sebagai ajang pameran, tetapi juga sebagai upaya untuk memberdayakan dan mengembangkan desa secara holistik, menciptakan dampak positif bagi masyarakat setempat dan lingkungan sekitarnya

b. Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

➤ **Jumlah Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Kecamatan Mojowarno Tahun 2026 mencakup 6 (enam) Program, 12 (duabelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) subkegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Subkegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- c. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan logistik
 - Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
 - Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
- Subkegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
 - Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
- a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
- a. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- **Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan**
- Dari 6 (enam) Program, 12 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) subkegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 untuk dilaksanakan di Kecamatan Mojowarno sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Mojowarno dan melingkupi semua desa (19 Desa).
- **Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya**

Sumber pendanaan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan pada Renja 2026 berasal dari APBD Kab. Jombang dengan jumlah seluruhnya adalah **Rp. 2.885.435.330**

c. Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Mojowarno Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027
KECAMATAN MOJOWARNO

KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBE R DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	Unsur Kewilayahan								
7.01	Kecamatan								
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	Kec. Mojowarno	77,55	8.575.857.128	APBD	Program Lanjutan	77,60	2.858.458.300
7.01.01 .2.01	Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojowarno	2 dokumen	6.178.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	3 dokumen	7.000.000
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mojowarno	5 dokumen				5 laporan	
7.01.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Mojowarno	2 dokumen	4.978.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	3 dokumen	6.000.000
7.01.01 .2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Mojowarno	5 dokumen	1.200.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	5 laporan	1.000.000
7.01.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mojowarno	16 orang/bula n	2.323.528.828	APBD	Kegiatan Lanjutan	16 orang/bula n	2.483.398.000

		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>1 Laporan</i>				<i>1 Laporan</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>		<i>12 dokumen</i>				<i>12 dokumen</i>	
7.01.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Mojowarno	16 orang/bulan	2.240.420.826	APBD	Subkegiatan Lanjutan	16 orang/bulan	2.400.000.000
7.01.01 .2.02.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Mojowarno	1 Laporan	700.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	1 Laporan	1.000.000
7.01.01 .2.02.0 005	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Mojowarno	12 dokumen	82.398.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	12 dokumen	82.398.000
7.01.01 .2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>16 paket</i>	<i>9.600.000</i>	<i>APBD</i>	<i>Kegiatan Lanjutan</i>	<i>16 paket</i>	<i>-</i>
7.01.01 .2.05.0 002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Mojowarno	16 paket	9.600.000	APBD		16 paket	-
7.01.01 .2.06.0 001	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan bangunan kantor yang terfasilitasi</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>6 paket</i>	<i>108.083.250</i>	<i>APBD</i>	<i>Kegiatan Lanjutan</i>	<i>6 paket</i>	<i>114.083.250</i>
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>16 paket</i>				<i>16 paket</i>	
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>1 paket</i>				<i>1 paket</i>	
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>2 paket</i>				<i>2 paket</i>	

		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>1 dokumen</i>				<i>1 dokumen</i>	
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>29 laporan</i>				<i>29 laporan</i>	
7.01.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	Kec. Mojowarno	6 paket	3.202.600	APBD	Subkegiatan Lanjutan	6 paket	4.202.600
7.01.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Mojowarno	16 paket	10.668.650	APBD	Subkegiatan Lanjutan	16 paket	11.668.650
7.01.01 .2.06.0 004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Mojowarno	1 paket	62.358.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	1 paket	63.358.000
7.01.01 .2.06.0 005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Mojowarno	2 paket	3.310.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	2 paket	4.310.000
7.01.01 .2.06.0 006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Mojowarno	1 dokumen	2,352,000.00	APBD	Subkegiatan Lanjutan	1 dokumen	2.352.000
7.01.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Mojowarno	29 laporan	26.192.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	29 laporan	27.192.000
7.01.01 .2.07.0 009	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>136 unit</i>	<i>91.494.650</i>	<i>APBD</i>	<i>Kegiatan Lanjutan</i>	<i>136 unit</i>	<i>92.494.650</i>
7.01.01 .2.07.0 009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec. Mojowarno	136 unit	91.494.650	APBD		136 unit	92.494.650
7.01.01 .2.08	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>24 laporan</i>	<i>105.180.000</i>	<i>APBD</i>	<i>Kegiatan Lanjutan</i>	<i>24 laporan</i>	<i>107.180.000</i>

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>24 laporan</i>				<i>24 laporan</i>	
7.01.01 .2.08.0 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Mojowarno	24 laporan	36.540.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	24 laporan	37.540.000
7.01.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Mojowarno	24 laporan	68.640.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	24 laporan	69.640.000
7.01.01 .2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>7 unit</i>	<i>51.302.400</i>	<i>APBD</i>	<i>Kegiatan Lanjutan</i>	<i>7 unit</i>	<i>54.302.400</i>
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>3 unit</i>				<i>3 unit</i>	
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>10 unit</i>				<i>10 unit</i>	
7.01.01 .2.09	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Mojowarno	7 unit	31.171.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	7 unit	32.171.000
7.01.01 .2.09.0 002	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Mojowarno	3 unit	10.471.400	APBD	Subkegiatan Lanjutan	3 unit	11.471.400
7.01.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Mojowarno	10 unit	9.660.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	10 unit	10.660.000
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Mojowarno	76,50%	9.800.000	APBD	Program Lanjutan	77,00%	13.787.500

7.01.02 .2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mojowarno	4 laporan	9.800.000	APBD	Kegiatan Lanjutan	4 laporan	13.787.500
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mojowarno	12 Laporan				12 Laporan	
7.01.02 .2.02.0 002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kec. Mojowarno	4 laporan	4.000.000	APBD	Subkegiatan Baru	4 laporan	5.000.000
7.01.02 .2.02.0 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mojowarno	12 Laporan	5.800.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	12 Laporan	10.800.000
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Mojowarno	75,50%	164.902.500	APBD	Program Lanjutan	76,00%	165.908.000
7.01.03 .2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kecamatan	Kec. Mojowarno	114 lembaga	164.902.500	APBD	Kegiatan Lanjutan	114 lembaga	165.908.000
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mojowarno	4 laporan				4 laporan	
7.01.03 .2.01.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kecamatan	Kec. Mojowarno	114 lembaga	17.000.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	114 lembaga	17.005.500
7.01.03 .2.01.0 003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Mojowarno	4 laporan	147.902.500	APBD	Subkegiatan Lanjutan	4 laporan	148.902.500

7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umu	Kec. Mojowarno	49,50%	7.950.000	APBD	Program Lanjutan	50,00%	8.950.000
7.01.04.2.02	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>12 laporan</i>	<i>7.950.000</i>	<i>APBD</i>	<i>Kegiatan Lanjutan</i>	<i>12 laporan</i>	<i>8.950.000</i>
7.01.04.2.02.001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Kec. Mojowarno	12 laporan	7.950.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	12 laporan	8.950.000
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Mojowarno	75,50%	81.316.000	APBD	Program Lanjutan	76,00%	226.135.000
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>45 orang</i>	<i>81.316.000</i>	<i>APBD</i>	<i>Kegiatan Lanjutan</i>	<i>45 orang</i>	<i>226.135.000</i>
		<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan</i>	<i>Kec. Mojowarno</i>	<i>4 dokumen</i>				<i>4 dokumen</i>	
7.01.05.2.01.003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Mojowarno	45 orang	28.216.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	100 orang	172.035.000
7.01.05.2.01.008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum KoordinasiPimpinan di Kecamatan	Kec. Mojowarno	4 dokumen	53.100.000	APBD	Subkegiatan Lanjutan	4 dokumen	54.100.000
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Mojowarno	75,50%	20.862.500	APBD	Program Lanjutan	76,00%	21.862.500

7.01.06 .2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Mojowarno	38 dokumen	20.862.500	APBD	Kegiatan Lanjutan	38 dokumen	21.862.500
7.01.06 .2.01.0 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Mojowarno	38 dokumen	20.862.500	APBD	Subkegiatan Lanjutan	38 dokumen	21.862.500
		TOTAL			2.907.377.478				3.297.113.800

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Mojowarno Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2026 sebagai acuan bagi OPD dan masyarakat yang berisi program, kegiatan, subkegiatan serta pagu indikatif. Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026 harus benar-benar dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2026 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Secara terperinci berikut disajikan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah :

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan tahun 2026

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	77,55	2.672.878.830
7.01.01 .2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>2 dokumen</i>	<i>4.378.000</i>
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>5 dokumen</i>	
7.01.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.678.000
7.01.01 .2.01.0 006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	700.000
7.01.01 .2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>16 orang/bulan</i>	<i>2.384.871.330</i>
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	<i>1 Laporan</i>	
		<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>12 dokumen</i>	
7.01.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang/bulan	2.314.721.330
7.01.01 .2.02.0 003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	700.000
7.01.01 .2.02.0 005	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	69.540.000
7.01.01 .2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>16 paket</i>	<i>0</i>
7.01.01 .2.05.0 002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	16 paket	0
7.01.01 .2.06.0 001	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>6 paket</i>	<i>71.732.100</i>
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>16 paket</i>	
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>2 paket</i>	

		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>1 dokumen</i>	
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>29 laporan</i>	
7.01.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakanbangunan kantor yang terfasilitasi	6 paket	3.178.200
7.01.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 paket	8.779.750
7.01.01 .2.06.0 004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	32.820.000
7.01.01 .2.06.0 005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	3.320.150
7.01.01 .2.06.0 006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.352.000
7.01.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29 laporan	21.282.000
7.01.01 .2.07.0 009	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>4 unit</i>	<i>37.475.000</i>
7.01.01 .2.07.0 009	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 unit	37.475.000
7.01.01 .2.08	<i>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>24 laporan</i>	<i>123.180.000</i>
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>24 laporan</i>	
7.01.01 .2.08.0 002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	30.540.000
7.01.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 laporan	92.640.000
7.01.01 .2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>7 unit</i>	<i>51.242.400</i>
		<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>3 unit</i>	
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>10 unit</i>	
7.01.01 .2.09	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	31.171.000

7.01.01 .2.09.0 002	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	10.641.400
7.01.01 .2.09.0 009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	9.430.000
7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	76,50%	13.787.500
7.01.02 .2.02	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>	4 laporan	13.787.500
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	
7.01.02 .2.02.0 002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	4.887.500
7.01.02 .2.02.0 003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	8.900.000
7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Capaian Nilai Aspek Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75,50%	54.315.500
7.01.03 .2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kecamatan</i>	114 lembaga	54.315.500
		<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	4 laporan	
7.01.03 .2.01.0 001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Kecamatan	114 lembaga	15.605.500
7.01.03 .2.01.0 003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 laporan	28.710.000
7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Capaian Nilai Aspek Ketentraman dan Ketertiban Umu	49,50%	7.950.000
7.01.04 .2.02	<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.</i>	12 laporan	7.950.000
7.01.04 .2.02.0 001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 laporan	7.950.000
7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Capaian Nilai Aspek Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75,50%	118.341.000

7.01.05 .2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 orang	118.341.000
		Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	
7.01.05 .2.01.0 03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45 orang	65.241.000
7.01.05 .2.01.0 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	53.100.000
7.01.06	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Capaian Nilai Aspek Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75,50%	18.162.500
7.01.06 .2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38 dokumen	18.162.500
7.01.06 .2.01.0 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38 dokumen	18.162.500
	TOTAL			2.885.435.330

BAB V PENUTUP

A. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD Kecamatan Mojowarno sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi diperlukan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Mojowarno merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program, kegiatan dan subkegiatan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan di tahun anggaran berikutnya .

- B. Kaidah – kaidah pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan berdasarkan rencana kerja PD Kecamatan Mojowarno dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.
- C. Rencana tindaklanjut PD Kecamatan Mojowarno pada tahun 2027 mendatang akan menetapkan program,kegiatan, dan subkegiatan yang sesuai dan selaras dengan program Kabupaten tahun 2027, dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2025 serta perhitungan kenaikan target kinerja.

Demikian Rencana Kerja PD Kecamatan Mojowarno tahun 2026 disusun, untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas – tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mojowarno, 11 Agustus 2025
PI. CAMAT MOJOWARNO

M. RONNY AFRIANDIE, S.STP., M.Si
Pembina
NIP. 198105231999121001